

**PERGULATAN TRADISI, AGAMA, NEGARA: ANALISIS SOSIO-KULTURAL
KETURUNAN TIONGHOA DAN PERKEMBANGAN GEREJA TIONGHOA
INDONESIA (1950-1999)**

Samudra Eka Cipta
Program Sarjana Departemen Pendidikan Sejarah
Universitas Pendidikan Indonesia
Samudraeka97@gmail.com

Abstrak

Pada masa Hindia Belanda sudah ada beberapa komunitas Tionghoa-Kristiani yang ditandai dengan adanya Gereja Tionghoa. Masa Demokrasi Liberal perkembangan Umat Tionghoa-Kristiani mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah terkait masalah identitas keagamaan bagi Masyarakat Keturunan. Pasca kejatuhan Demokrasi Terpimpin dengan lahirnya Orde Baru, perkembangan Umat Tionghoa-Kristiani meningkat tajam. Politik yang dilakukan Masa Orde Baru yakni ‘politik asimilasi’ dengan berusaha menghilangkan unsur kebudayaan pada masyarakat tertentu. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang melarang adanya praktik Ajaran Konfusianisme bagi Masyarakat Keturunan Tionghoa karena dianggap sebagai bentuk propaganda Komunisme Tiongkok. Selama Masa Orde Baru Keturunan Tionghoa melakukan konversi keagamaan secara besar-besaran. Dampak lain yang ditimbulkan bagi Masyarakat Keturunan adalah perubahan nama dengan berunsurkan nama layaknya orang Indonesia pada umumnya. Penelitian ini melahirkan rumusan masalah yakni 1) bagaimana awal perkembangan sosial Masyarakat Keturunan Tionghoa?, 2) bagaimana respon Masyarakat Tionghoa Indonesia terhadap kebijakan Pemerintah Masa Soekarno dan Soeharto?, 3) bagaimana upaya rekonsiliasi dalam upaya melestarikan kembali nilai-nilai budaya dan filosofis bagi masyarakat Keturunan Tionghoa?

Kata Kunci: Tionghoa, Kristen, Tradisi, Agama, Budaya

Abstract

During the Dutch East Indies there were already a number of Chinese-Christian communities that were marked by the Chinese Church. The period of Liberal Democracy, the development of Chinese-Christians experienced rapid development. This development is supported by government policies related to the issue of religious identity for Descendants. After the fall of Guided Democracy with the birth of the New Order, the development of the Chinese-Christian community increased sharply. The politics carried out during the New Order period are 'politics of assimilation' by trying to eliminate the cultural elements of certain societies. This was marked by the policy of the New Order Government which forbade the practice of Confucian Teaching for the People of Chinese Descent because it was considered a form of propaganda of Chinese Communism. During the New Order era, Chinese descendants carried out large-scale religious conversions. Another impact caused by the Descendants is a change of name with the name like Indonesians in general. This research gave birth to the formulation of the problem namely 1) how did the Chinese Social Society's social development start? Chinese ancestry?

Keywords: Chinese, Christian, Tradition, Religion, Culture

PENDAHULUAN

Sejarah Masyarakat Keturunan Tionghoa sudah ada jauh sebelum Masa Kolonialisme di Indonesia. Mereka para imigran Keturunan Tionghoa melakukan migrasi ke Indonesia dengan melakukan upaya perdagangan dengan penduduk asli Nusantara. Kehadiran mereka mendapatkan sambutan yang positif dikalangan masyarakat pribumi dan terjalinlah pola akulturasi agar kehadiran warga Tionghoa mendapatkan pengakuan secara lokal oleh masyarakat. Perkembangan Bangsa Indonesia terus mengalami dinamika pada setiap periodisasinya. Dari dinamika tersebut kemudian ada sebuah usaha untuk memperkuat dan mempersatukan Bangsa Indonesia melalui nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia dimulai sejak tahun 1901-1920 atau dikenal sebagai Masa Awal Pergerakan Indonesia dengan ditandainya organisasi pergerakan baik yang memiliki orientasi pada pendidikan maupun politik juga sebagai bentuk dalam mendapatkan hak dan pengakuan kedudukan sosial sebagai Bangsa Indonesia yang kuat.

Sebelum era Kemerdekaan Indonesia, peranakan Tionghoa di Hindia Belanda, terpecah menjadi tiga kelompok dalam orientasi politiknya yakni kelompok yang pro terhadap Belanda, kelompok yang cenderung netral maupun kelompok yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun dari ketiga kelompok tersebut sokongan terhadap nasionalisme di Indonesia merupakan gagasan penting dalam sejarah jejak Keturunan Tionghoa di Indonesia. Semangat nasionalisme Indonesia di antara peranakan semakin menguat menjelang Kemerdekaan Indonesia terlebih ketika THHK (*Tionghoa Hoa Hwee Kwan*) yang didirikan Lim Koen Hian merupakan salah satu organisasi keturunan Tionghoa siap secara mental dalam menuangkan ide gagasan semangat nasionalisme di Indonesia. Bersama dengan Abdurahman Baswedan yang juga merupakan Keturunan Arab Peranakan di Indonesia mereka membentuk koalisi *Arab-Tionghoa Indonesia* sebagai bentuk perwujudan nasionalisme di Indonesia. Keberadaan Masyarakat Tionghoa Keturunan Indonesia tidak dianggap sebagai golongan *termarginalkan* melainkan memberikan dampak positif bagi Sejarah Indonesia. Namun sayang justru peranan Masyarakat Keturunan non-pribumi tidak begitu diijelaskan secara mendalam bahkan tidak sama sekali dalam perkembangan historiografi Indonesia (penulisan sejarah).

Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar yang bertempat tinggal di Jawa, terutama di daerah pesisir Utara Pantai Jawa. Dari segi bahasa yang diajarkan sebagai komunikasi adalah Bahasa *Hokkian* yang pada perkembangan selanjutnya menjadi bahasa pemersatu diantara orang-orang Tionghoa. Bahasa ini digunakan setelah Bahasa Mandarin. Bahasa *Hokkian* adalah bahasa yang penuturnya dari wilayah Kanton. Mereka datang ke Pulau

Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain. Kemudian mereka mendirikan perkampungan-perkampungan kecil yang selama Masa Kolonial sangat diperketat aturan perkampungan milik Warga Keturunan Tionghoa tersebut (Utomo, 2010, hlm. 7).

Diaspora Masyarakat Keturunan Tionghoa dalam prespektif kajian antropologi semakin populer karena konsep diaspora diambil dari kesulitan yang ada dalam paradigma etnis dan ras yang ada, terutama dalam mengenali pergerakan populasi transnasional yang tinggi dan keberadaannya sebagai bentuk identitas nasional. Selain itu, konsep etnisitas tidak dapat melihat hubungan simbiosis antara migran, negara penerima, dan negara asal. Ini disebabkan oleh paradigma etnisitas yang cenderung mengabaikan level transnasional dan hanya fokus pada kerangka negara dan bangsa. Implikasinya adalah bahwa ketika kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, banyak ahli memperkirakan hilangnya ikatan berdasarkan etnis, ras, dan bangsa. Memang, kategori etnis mengacu pada populasi yang terhubung dengan kesamaan tempat asal, esensi, dan pengalaman yang berbeda. Tetapi dengan meningkatnya jumlah orang yang tidak lagi tinggal di negara asal mereka, konsep etnis menjadi bermasalah.

Selama proses sejarahnya Masyarakat Tionghoa terus mengalami tekanan diskriminasi sejak jaman Kolonial Belanda hingga Masa Orde Baru. Tindakan negara yang diberikan oleh Masyarakat Keturunan Tionghoa adalah berusaha ‘menasionalisasikan’ dan mengasimilasikan Kebudayaan Warga Etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut diantaranya perubahan nama dan konversi keagamaan sebagai bentuk asimilasi yang sangat nyata yang dirasakan oleh Masyarakat Keturunan Tionghoa. Mereka juga dipaksa atau secara sukarela untuk memeluk agama Kristen karena sebagai agama yang memiliki kesamaan dengan tradisi Konfusianisme secara doktrinisasi. Seiring waktu semakin banyak warga Keturunan Tionghoa yang pada akhirnya sadar akan semangat nasionalisme dengan mendirikan organisasi-organisasi soail sekaligus gereja-gereja yang memiliki orientasi ke-Indonesiaan. Sebagian masyarakat Keturunan Tionghoa juga menginginkan agar dirinya kelak masuk ke dalam historiografi Sejarah Indonesia dengan menuliskan peran para Keturunan Tionghoa dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Era Reformasi telah menghadirkan babak baru dalam sejarah Tionghoa di Indonesia terhadap proses integrasi keturunan Tionghoa dalam rumah kebangsaan Indonesia. Pada masa reformasi Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12/2006. Kedudukan undang-undang ini mendapatkan dukungan penuh dari kalangan Masyarakat Keturunan Tionghoa, seperti tertuang dalam pasal 4, mengakui hak kewarganegaraan bagi siapa saja yang lahir di Indonesia. Maka warga keturunan Tionghoa

secara legal formal bukan lagi warga negara kelas dua, yang diperlakukan sebagai tamu yang dicurigai di rumah kebangsaan dengan tetap menjalankan tradisi yang telah diajarkan oleh para leluhurnya.

METODE PENELITIAN

Data yang diolah berdasarkan dengan studi kepustakaan yakni dengan menggunakan berbagai macam sumber literasi yang mendukung dalam kajian ini. Sumber-sumber yang digunakan menggunakan buku, jurnal, dan beberapa sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Menggunakan pendekatan kualitatif artinya kajian ini ditulis berdasarkan penggambaran deskriptif dari sumber yang didapatkan. Juga menggunakan metodologi historis sebagai pengembangan kajian.

Penulis juga menggunakan pendekatan metode penulisan sejarah yakni dimulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik (Ismaun, dkk. 2006, hlm. 20) adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah serta penggunaan metode studi konten isi yakni dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari beberapa sumber dengan mengkaji beberapa temuan berupa pengumpulan buku-buku sebagai sumber referensi sekaligus pembandingan sumber pada pembahasan ini. (Krippendorff, 1991) menjelaskan, analisis isi bukan sekadar menjadikan isi pesan sebagai objeknya, melainkan juga terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi atau keterangan-keterangan yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Berkembangnya Komunitas Tionghoa dan Proses Alkultisasi Kebudayaan di Indonesia

Masyarakat Tionghoa sudah datang ke Indonesia jauh sebelum Abad ke-19 Masehi. Kedatangannya pada mulanya hanya untuk kepentingan perdagangan dan melakukan interaksi dengan Masyarakat Bumiputera. Seiring dengan kedinamisannya tidak sedikit masyarakat Tionghoa melakukan proses alkultisasi dengan masyarakat Bumiputera mulai dari proses perubahan nama hingga melakukan konversi keagamaan. Tradisi itu sudah dilakukan agar keberadaan Masyarakat Tionghoa dapat diterima oleh Masyarakat. Pada masa itu, jumlah Orang Tionghoa yang memeluk Muslim lebih banyak ketimbang memeluk Kristen. Masyarakat Belanda menyebut Tionghoa Muslim dengan sebutan *Geschoren Chinese*. Orang Tionghoa

yang masuk Islam, akan diikuti dengan tradisi memotong kucir atau *thauwcang* sebagai simbol. Dalam Peraturan Hukum Tata Negara Kolonial Keturunan Sino-Indonesia yang beragama Islam akan dimasukkan kedalam golongan kedua yakni golongan *Mooren* (suatu penyebutan Istilah Orang Barat/Belanda terhadap Muslim).

Komunitas Tionghoa Muslim melabeli dirinya sebagai Tionghoa Peranakan atau Sino-Indonesia. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya masuk ke lingkungan kraton untuk diangkat menjadi ningrat kraton. Keberadaan Masyarakat Tionghoa memiliki arti penting bagi pejabat kraton yang difungsikan sebagai ‘pihak ketiga’ dalam menjaga seluruh aset dan kepentingan kebijakan bidang sosial ekonomi yang diterapkan oleh pihak kraton. Disisi lain tidak sedikit masyarakat Tionghoa dipekerjakan oleh para pejabat lokal untuk dijadikan sebagai pekerja bangunan untuk membangun masjid-masjid dan fasilitas milik Kraton seperti yang terjadi di Sumenep pada tahun 1740 Masehi para pekerja tersebut kemudian dipanggil untuk menghadap panembahan Sumenep untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan dan dikonsentrasikan pada suatu desa sebagai perkampungan masyarakat Keturunan Sino-Indonesia di Sumenep. Sama halnya dengan kebanyakan masyarakat Tionghoa di wilayah lainnya yang melakukan proses alkulturasi kemudian diantara melakukan alkulturasi dengan menikahi perempuan-perempuan lokal dan mengubahnya dengan nama Muslim seperti yang terjadi di Sumenep (Onghokham. 2009. hlm 23).

Di lain pihak terdapat adanya usaha untuk melakukan kristenisasi yang semula dilakukan oleh para zending kemudian dilakukan oleh para perkabar zending yang didatangkan dari Kanton. Mulanya kedatangan para penginjil tersebut berasal dari *Qian Zhou* (Tjan Tjiu), Fu Jian, China ke Surabaya dengan tujuan untuk berdagang. Mereka adalah orang-orang Kristen berlatar belakang *Presbyterian* (suatu sekte dalam ajaran Protestanisme). Saat itu belum ada gereja Tionghoa di Surabaya, tetapi setiap hari Minggu mereka berkumpul untuk melakukan kebaktian. Usaha penginjilan dimulai sejak tahun 1909 bermula dari persekutuan rumah tangga yang dihadiri oleh beberapa orang dari suku Kanton. Pertumbuhan jemaat mulai berkembang melalui kedatangan misi Methodist yang menjangkau orang Tionghoa di Surabaya. Penggunaan Bahasa *Hokkian* merupakan strategi yang dilakukan oleh para perkabar injil Tionghoa dalam melakukan pengkabarannya atau kristenisasi sekaligus menjadi bahasa utama dalam peribadatan.

Di Batavia kelompok Masyarakat Tionghoa merupakan kelompok masyarakat Sino-Indonesia merupakan permulaan yang menetap di Jawa. Seiring dengan dibentuknya kampung-kampung Tionghoa seperti Glodok, dan Benteng. Belanda kemudian membuat sebuah peraturan yang dikenal sebagai *wijkenstelsel* dengan maksud mengisolasi etnis Tionghoa dalam kampung khusus (pecinan). Tujuannya untuk menghindari tercampurnya orang Tionghoa dan

Jawa. Peraturan itu juga digunakan untuk mengontrol secara ketat kegiatan dagang dan aktivitas sosial Tionghoa. Peraturan tersebut dituangkan dalam *Staatsblad* tahun 1835 no. 37 untuk terhindarnya proses alkulturasi dengan orang-orang Jawa saat itu dengan membentuk sistem sosial tersendiri dengan memilih kepala kampung yang berasal dari etnisnya. Alasan lain diberlakukannya peraturan tersebut karena untuk memonopoli Candu agar sepenuhnya dapat dikontrol oleh Pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial sangat berkaca pada Peristiwa Perang Candu yang disebabkan oleh permasalahan Perdagangan Candu antara Inggris dengan Pedagang Tionghoa di Hongkong selama permulaan Abad ke-19.

Selama masa pengasingan permahalan Masyarakat Tionghoa bangkit dan perlahan memulai kembali usaha dan bisnis yang dilakukan oleh para leluhurnya salah satunya dengan memberikan modal usaha dan pinjaman kepada orang Jawa berupa bahan-bahan sembako dan peralatan rumah tangga. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai "*Cina Minding*", yakni orang Tionghoa yang berprofesi sebagai renternir atau sebagai pihak yang meminjamkan barang atau uang secara kredit dengan berkeliling kampung untuk menagih kepada pihak yang meminjamkannya. Munculnya sistem kredit karena pada tahun 1870 seiring diterapkannya Undang-Undang Agraria yang berusaha meningkatkan kembali gairah perekonomian pedesaan memunculkan sistem kredit tersebut dengan adanya perdagangan dalam bentuk kredit. Perdagangan *klonthong* atas dasar kredit ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak karena masyarakat tidak terlalu terbebani akan penggunaan uang tunai secara langsung dan pedagang *klonthong* memperoleh keuntungan karena barang dagangannya dengan cepat terjual habis. Objek transaksinya berupa barang-barang peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, panci, kemeja, celana dan lain-lain. Transaksi *minding* barang ini tidak berbelit-belit karena pembeli langsung bertemu dengan penjual barang tanpa surat perjanjian dan saksi. Namun pedagang *klonthong* ini memiliki catatan daftar pembeli untuk setiap daerah kerjanya (Darini, 2008).

B. Masa Bergerak Sino-Indonesia "Peranakan"

Tahun 1904-1910 merupakan awal bangkitnya Keturunan Tionghoa Peranakan untuk melakukan rekonsiliasi dengan membangun semangat egaliter atau kesederajatan diantara Masyarakat Tionghoa Peranakan dan Bumiputera. Faktor tersebut dilatarbelakangi adanya semangat nasionalisme di Daratan Tiongkok oleh gagasan Sun Yat Sen yang ingin menyatukan seluruh etnis Tionghoa di seluruh dunia agar mendapatkan kebebasan serta memperebutkan kembali hak-hak sipil sebagai mana yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Lahirnya kaum nasionalis dari kalangan Tionghoa Peranakan memaksakan Pemerintah Kolonial untuk memperjuangkan penghapusan yang dianggap membatasi kebebasan terutama pada aspek

sosial-ekonomi (Kahin. 2003, hlm. 82). Mereka juga memperjuangkan pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang dikelola oleh THHK (*Tionghoa Hwua Hwee Koan*). Latar-belakang didirikannya Tiong Hoa Hwee Koan yakni berusaha untuk semangat ‘nasional’ sebagai kebutuhan kehidupan dalam kebersamaan di Indonesiaera Kolonial Belanda. Para tokoh pendiri THHK jelas memiliki **visi** tentang makna ‘Kebangsaan’ yang menjadi perjuangan mereka melawan penindasan kolonial Belanda; jadi ‘Kebangsaan’ yang dimaksud adalah ‘Kebangsaan’ Indonesia (Hindhia Belanda), bukan ‘Kebangsaan’ seperti yang diperjuangkan di daratan Tiongkok.

Para Keturunan Tionghoa kemudian melakukan berbagai perjuangan baik bidang politik maupun pers sebagai media untuk melakukan perjuangan. Liem Koen Hian merupakan sosok Tionghoa-Nasionalis, usaha perjuangan yang dilakukan oleh dirinya yakni mendirikan PTI (Partai Tionghoa Indonesia) suatu partai poliik yang sifatnya non-koperatif, artinya tidak ada hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Partai juga ini memiliki orientasi sosial-budaya dengan memperjuangkan penuh hak-hak Komunitas Sino-Indonesia. Pada bidang pers Liem Koen Hian mendirikan Surat Kabar Harian *Sin Tit Po* yaitu harian Berbahasa Melayu-Tionghoa yang memberitakan tentang permasalahan sosial masyarakat dalam arti luas sebagai akibat kebijakan kolonial. Pelanggan koran ini bukan hanya saja dari Kalangan Masyarakat Tionghoa akan tetapi kalangan masyarakat Bumiputera sebagai pelanggan setia harian tersebut.

Terdapat dualisme diantara sesama Masyarakat Tionghoa yang pro Republik dan pro Belanda. Pendirian PTI memiliki maksud lain untuk menyerang Organisasi *Chung Hua Hui* yang didirikan oleh Sim Kie Ay. *Chung Hua Hui* adalah kelompok elite Tionghoa pro-Belanda di masa kolonial. Dualisme tersebut terjadi karena perbedaan orientasi serta ideologis diantara keduanya. Liem Koen Hian memiliki orientasi pada pembentukan “kemandirian” serta memperkuat kembali tradisi dengan semangat nasionalisme sedang Sim Kie Ay memiliki orientasi yang berbeda dan cenderung “ke-barat-baratan” serta menganggap Masyarakat Indonesia secara psikologis dan budaya masih belum kuat untuk menjadikannya suatu bangsa.

Dilain pihak, kehadiran PTI tidak begitu mendapatkan simpati dikalangan orang-orang Tionghoa karena menganggap PTI terlalu homogen dengan komposisi jumlah Masyarakat Bumiputera yang menduduki struktural PTI cenderung lebih banyak ketimbang orang-orang Tionghoa itu sendiri. Hal tersebut dimanfaatkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang banyak melibatkan orang-orang Tionghoa untuk melakukan pergerakan bawah tanah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kaum Nasionalis-Tionghoa dengan menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai elit partai. Berkat usaha yang dilakukan oleh Tan Ling Jie seorang pro-

komunis kemudian mengajak Tionghoa peranakan lainnya untuk bergabung ke PKI. Kedekatan Tan Ling Jie dengan ideologi komunis telah terjalin ketika masih kuliah di Belanda disusul dengan menguatnya hubungan baik secara politik maupun secara personal antara Sneevilt dengan Tan Ling Jie (Ricklefs, 2008, hlm. 370). Pada tahun 1926 terjadinya Pemberontakan secara besar-besaran yang dilakukan oleh PKI dengan melibatkan banyak kader PKI dari orang-orang Tionghoa. Setelah berhasil diredam oleh Pemerintah Kolonial kemudian orang Tionghoa yang dianggap terlibat kemudian ditangkap diantaranya Tjoe Tong Hin, Liem King Hien, Lie Tiang Pik, Tjan Tok Gwan, Tan Thoan Kie, Pwa Tjing Hwie, Tan Bing Bo, Sie Glimbong alias Sie Tjwan Liat, Liem Thaij Thjwan dan Lie Eng Hok. Mereka kemudian dibuang ke Tanah Merah Boven Digoel pada 1927.

Pada masa tersebut terjadinya konversi agama fase kedua secara besar-besaran. Seiring dengan kekecewaan terhadap kelompok nasionalis Keturunan Sino-Indonesia melakukan konversi keagamaan menjadi Kristen. Pada tahun 1939 mengalami peningkatan pesat. Pertumbuhan tersebut diimbangi dengan banyaknya gereja-gereja Patekoan. Gouw Ko yang merupakan pendeta sekaligus perkarib injil dari Gereja Patekoan berhasil membaptis 150 Orang Tionghoa. Perkembangan kristenisasi Masyarakat Tionghoa mengakibatkan penambahan jemaat sehingga pada tahun 1940 didirikannya Gereja THKTKH (*Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee*). Gereja ini pada masa awal pendirian merupakan gereja yang berdiri secara otonom. Tujuan dari didirikannya THKTKH yakni untuk menyamakan persepsi antara Jemaat Tionghoa Totok (*singkeh*) dengan Jemaat Tionghoa Peranakan. NZV (*Nederlandsche Zending Vereniging*), sebagai Organisasi Zending Hindia Belanda mulanya memberikan support penuh terhadap gereja Tionghoa tersebut dengan memberikan bantuan dana. Akan tetapi pada tahun 24 Maret 1940 NZV sudah tidak terkait dengan THHKK, mengingat banyak dari jemaatnya yang ternyata pro terhadap Nasionalisme Indonesia (Japalatu. 2019., hlm. 16) .

C. Masa Konsolidasi 1950-1965

Di awal kemerdekaan, secara umum keberadaan orang Tionghoa dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yakni Kelompok yang berorientasi pada Indonesia, kelompok ini yang rela dan siap membantu kaum Republik mendukung secara penuh Kemerdekaan Indonesia. Kedua, kelompok yang berorientasi ke Belanda dan Tiongkok, diantara mereka ini adalah kurang lebih 40.000 orang Tionghoa yang di tahun 1949 sebagian besar mereka menolak tawaran kewarganegaraan pemerintah RI dan memilih pulang ke negeri leluhur ditambah dengan isu dwi kewarganegaraan. (Greif, 1991. hlm. 11) (dalam Nurhajarini . 2015, hlm. 42).

Tahun 1950 merupakan tahun Keturunan Tionghoa secara perlahan mendapatkan pengakuan oleh negara dengan melibatkan seorang tokoh Keturunan Tionghoa yakni Sim Kie

Ay untuk menjadi delegasi pada Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Mohammad Hatta mengajak tokoh tersebut yang sebelumnya ketika Masa Pergerakan Nasional Sim Kie Ay memiliki orientasi pro-Belanda. Pada tahun yang sama kelompok *Chuang Hua Hui* ikut meminta kepada komandan militer Alex Kaliwarang yang saat itu merupakan pengganti dari Edi Sukardi. Kedekatan Alex Kaliwarang dengan masyarakat Keturunan Tionghoa sudah terjalin ketika Masa Kependudukan Jepang. Perwakilan organisasi tersebut meminta agar seluruh aset ekonomi milik warga peranakan tidak dihancurkan selama masa perang. Sebagai gantinya, anggota kelompok tersebut setia membantu pasukan Republik dalam menghadapi Agresi Militer Belanda.

Di sisi lain, perkembangan Umat Kristen Keturunan Tionghoa mengalami dinamika yang berujung konflik internal. Pemicunya adalah masa internal-organisatoris. Terjadi pertentangan antara jemaat Kristen Patekoan dengan Pdt. Gouw Khiam Kiet. Perpecahan tersebut tidak dapat dihindarkan sehingga mendirikan gereja-gereja baru. Perpecahan tersebut mengakibatkan Gereja Patekoan keluar dari keanggotaan *Kho Hwee* Jawa Barat (GKI Jawa Barat) tahun 1952. Pada tahun yang sama Urusan Persengketaan Perumahan (UPP) berusaha mengambil alih kembali lahan yang digunakan oleh Majelis Gereja Patekoan yang saat itu masih berstatus sewa tanah atas sengketa tersebut. Unjuk rasa yang dilakukan oleh para Jemaat tidak dapat dihindarkan sebagai akibat buntut panjang sengketa Gereja Patekoan. Spanduk-spanduk dipasangkan setelah melakukan kebaktian. Mereka menuntut pihak UPP agar tanah yang disengketakan tetap menjadi milik secara sah oleh Majelis Patekoan, Kemudian munculah Yap Thiam Hien selaku pengacara yang mampu menyelesaikan konflik tersebut dan akhirnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan para jemaat dapat melakukan peribadatan dengan normal. Yap dikenal oleh Masyarakat Kristen Tionghoa sebagai orang yang membela klas sosial terutama bagi kalangan Kristen Tionghoa. Yap sangat berjasa besar karena keteguhannya yang kuat mengabdikan untuk menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1954 muncul dari Gereja *Toasiebo* yang merupakan gereja Katolik pertama kali menggunakan misa berbahasa Indonesia. Perubahan misa dari Bahasa *Hokkian* menjadi Bahasa Indonesia merupakan inisiatif dari Pater Joannes Tchong Chao Min SJ sebagai pengurus gereja yang menganjurkan agar umatnya dapat memahami Budaya Indonesia dimasa transisi awal pembentukan Republik. Tahun 1956 gereja Tionghoa berbahasa Indonesia memisahkan diri menjadi Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, dengan keluarnya Gereja Tionghoa berbahasa Tionghoa maka nama THKTKKH sepenuhnya menjadi nama Gereja Tionghoa berbahasa Mandarin.

Tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden No. 10 Tahun 1959. Dalam putusan presiden tersebut meminta kepada Masyarakat Keturunan Tionghoa agar mendapatkan status Kewarganegaraan Indonesia setelah munculnya kasus banyak warga Keturunan Tionghoa yang kembali ke Tiongkok Daratan. Pemerintah Tiongkok melalui Perdana Menteri Chou En Lai menolak warga keturunan untuk kembali ke tanah leluhurnya karena alasan status *ius soli* yang didasarkan atas tempat kelahiran mereka. Menteri Subandrio yang saat itu menjadi Menlu juga melakukan pelarangan bagi Masyarakat Tionghoa untuk pergi ke Tiongkok (Mozingo. 2007, hlm 170.). Pemerintah juga melarang warga Keturunan Tionghoa untuk mengadakan perdagangan di desa tujuannya adalah untuk memutus rantai perkreditan di tingkat desa dengan melakukan perpindahan ke wilayah kota sebagai opsi. Pada akhir 1959, kawasan kawasan pedesaan mulai ditinggalkan penghuninya. Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan yang melarang toko *klonhthong* di daerah pedesaan yang sebelumnya sebagai pusat perekonomian bagi Masyarakat Keturunan Tionghoa sebagai dampak warisan Tionghoa dalam hal perekonomian. Banyak Setahun berikutnya, tahun 1960 pemerintah kembali menerbitkan aturan melalui Menteri Sosial Moeljadi agar melakukan imbahuan kepada Masyarakat Keturunan Tionghoa agar mengganti atau menambahkan dengan nama orang Indonesia. Semisal nama "Ong" dapat dimodifikasi menjadi Onggowastio, atau nama "Tan" menjadi Tanojoyo. Bahkan nama-nama yang berunsurkan Islam atau Melayu seperti "Abdulkarim Oey". Praktik perubahan nama ini kemudian dilanjutkan pada Masa Orde Baru. Politik perubahan nama tersebut merupakan sebuah politik asimilasi yang diterapkan oleh Soekarno. Maka dapat dikatakan sebagai tanda-tanda bahwa Golongan Tionghoa Peranakan sudah dilebur dan diintegrasikan melalui kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun Yap Thiam Hien menolak untuk melakukan perubahan nama seseorang dan menganggap tidak akan memuaskan para rasialis ataupun memberikan kebahagiaan bagi orang Indonesia yang sadar dan rasional. Yap Thiam Hien menyatakan bahwa pengubahan nama tidak begitu berguna bagi pembentukan suatu bangsa Indonesia yang bersatu.

Tahun 1961 seorang Keturunan Tionghoa Giok Tjhan yang juga sekaligus Ketua Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) mendirikan universitas *Res Publica* yakni sebuah universitas yang bertujuan meningkatkan intelektualitas masyarakat Indonesia dengan membuka universitas-universitas *Res Publica* hampir di semua kota-kota besar di Indonesia. Pembukaan Universitas *Res Publica* di buka untuk masyarakat yang luas dan namanya *Res Publica* sudah menunjukkan pengabdian pada publik, rakyat umum, jelas mencerminkan tujuan dari universitas ini. Universitas ini kemudian ditutup oleh Soeharto dan kembali dibuka dengan nama Universitas Trisakti.

Selama periode 1963-1965 merupakan periode terberat bukan hanya saja bagi kalangan elit politik namun secara sosial kultural menjadi pukulan berat bagi para Keturunan Tionghoa. Pergolakan politik mulai perseteruan antara pihak sipil vs militer hingga meletusnya Gerakan 30 September memaksakan masyarakat Keturunan Tiongho khususnya harus melakukan konversi keagamaan pada fase ketiga Masyarakat Tionghoa banyak menganut agama Kristen karena dikhawatirkan akan diberi label ateis dan komunis. Meningingat bahwa Konfusianisme atau Konghucu diyakini bukan merupakan sebagai agama melainkan sebagai kepercayaan yang mengajarkan falsafah kehidupan bagi Masyarakat Etnis Tionghoa secara umum. Sebagian mereka yana baru memeluk Agama Kristen menganggap bahwa secara doktrin Ajaran Kristen tidak jauh berbeda dengan Konfusianisme, terdapat persamaan diantara keduanya dengan adanya ‘‘Konsep Tritunggal’’ dan ‘‘Konsep Dewa’’ yang diajarkan dalam doktrin keduanya (Irene Susanto, 2017).

D. Masa Orde Baru Hingga Menuju Pemantapan

Pemerintah Orde Baru berusaha mengakomodir Masyarakat Keturunan Tionghoa hanya dalam aspek ekonomi. Hal tersebut pada masa Orde Baru pemerintah mengambil kebijakan dengan menjadikan para pengusaha Keturunan Tionghoa menjadi pemegang aset dan modal dalam perekonomian Indonesia. Sebagai dampaknya munculnya berbagai pengusaha yang beretnis Tionghoa dari berbagai usaha yang dijalankan. Sebut saja dalam bidang industri makanan ada Sudono Salim pemilik dari Indofood yang pada perkembangan selanjutnya mendirikan Perusahaan *Salim Group*. Kemudian bidang gaya hidup ada dua saudara pengusaha yang saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia yakni Bambang dan Budi Hartono sebagai pemilik Rokok *Djarum*. Bidang properti dan alat tulis dimiliki oleh Eka Tjipta Widjadja sebagai pemilik Sinar Mas. Hal ini yang menyebabkan dipersepsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya, lagi-lagi sebagai pengistimewaan, dan memandang orang Tionghoa secara negatif serta menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial diantara keduanya (Dominggus. 2001, hlm. 274).

Ketika pasca peristiwa Peristiwa Gerakan 30 September timbul kekhawatiran dari Soeharto atas peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya para jendral Angkatan Darat sebagai akibat buntut panjang dari konflik berkepanjangan di tubuh AD. Soeharto mengambil sikap untuk menghancurkan pengaruh komunisme di Indonesia. Disisi lain, Soeharto juga berusaha melalui berbagai kebijakannya menghapus unsur-unsur Tiongkok pada Masyarakat Keturunan Tionghoa khususnya. Soeharto beranggapan bahwa Tiongkok merupakan pusat Komunisme Internasional Baru yang mana ketika Masa Demokrasi Terpimpin mulai menerapkan Kebijakan Politik ‘‘Poros Jakarta-Peking’’. Presiden Soekarno sangat memiliki hubungan secara politik

dan personal dengan para pemimpin negara komunis sehingga Soeharto berusaha untuk ‘membersihkan’ pengaruh tersebut. Bukan hanya itu saja, Pemerintah Orde Baru menangkap semua para mantan ajudan atau pengawal pribadi Soekarno mulai dari Omar Dhani dari AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) hingga seorang prajurit ABRI Keturunan Tionghoa Oei Tjoe Tat sekaligus merupakan salah satu ajudan pribadi Soekarno ikut ditangkap oleh Rezim Orde Baru karena dianggap memiliki kedekatan dengan komunis.

Dalam bidang politik Pemerintah Orde Baru melarang semua organisasi sosial-politik beretnis Tionghoa. Orang-orang Keturunan Tionghoa hanya diperbolehkan untuk masuk ke tiga organisasi partai politik yakni Golkar, PPP, dan PDI. Kebanyakan dari mereka enggan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut dan menganggap sebagai usaha pembatasan hak dalam hal kebebasan berpolitik. Periode ini dikenal oleh Masyarakat Keturunan Tionghoa sebagai periode ‘diskriminasi’. Masyarakat Tionghoa sebagian dari mereka bergerak dan berjuang untuk mendapatkan hak dan pengakuan sebagai warga negara melalui organisasi yang membidangi akademisi seperti *Centre Strategic and International Studies* (CSIS) dan Badan Komunikasi (BAKOM) yang hampir seluruhnya beranggotakan para Keturunan Tionghoa ‘Peranakan’ (Suryadinata, 2010, hlm. 219).

Tahun 1968 terjadi peristiwa sejarah baru dalam sejarah Gereja Tionghoa, nama THKTKKH dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman maka dalam sidang gereja- gereja di Murnajati Lawang nama tersebut diganti dengan Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) pada sidang tersebut juga disahkan Tata Gereja dan Peraturan khusus GKT, persidangan juga memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah Alkitab, karena kebutuhan tenaga hamba Tuhan untuk meningkatkan perkembangan pelayanan yang semakin meluas sedangkan tenaga hamba Tuhan yang tersedia pada saat itu sangat terbatas. Tahun 1969 Institut Alkitab GKT (saat ini menjadi Institut Theologia Aletheia) didirikan dengan 15 orang siswa pada awal pendiriannya dan jabatan rektor pada waktu itu dipercayakan kepada Pdt. Baring L Yang seorang tamatan *The Nanking Theological Seminary*. Sebagai akibat dari Kebijakan Masa Orde Baru terkait dengan Keberadaan Umat Kristen dan Gereja Tionghoa maka pada tahun 1986 berdirilah Gereja Kristen Indonesia (GKI). Pendirian GKI diiringi dengan pembentukan Komisi Perkekap (Persekutuan Antarkeluarga untuk Kesaksian dan Pelayanan). Komisi ini difungsikan sebagai wadah pembinaan, kaderisasi pemimpin, dan sarana komunikasi antar anggota jemaat. GKI juga mendirikan Pernias (Yayasan Perniagaan Satu). Tujuan pendirian yayasan ini untuk melakukan pelayanan-pelayanan sosial masyarakat sebagai naungan GKI.

Tahun 1996 GKI mulai mengadakan program beasiswa kepada anggota jemaat dan masyarakat tidak mampu sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. GKI membiayai

anak-anak mulai dari tingkat TK SD SMP/SMK. Majelis GKI juga membuka pelayanan Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. GKI juga mencarikan guru agama Kristen agar siap ditempatkan di sekolah dengan melakukan kerjasama melalui Kementerian Agama dan Kementrian Pendidikan agar GKI dijadikan sebagai pihak ketiga dalam membentuk guru sekaligus merumuskan kurikulum mata pelajaran Agama Kristen.

Krisis ekonomi tahun 1998 sebagai klimaks akhir dari kekuasaan Soeharto dan pasca setelahnya munculah tiga partai politik baru yang didominasi oleh Etnis Keturunan Tionghoa yakni Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembaruan Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia. Didirikannya juga Lembaga Swadaya Masyarakat baru yakni Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (*Yinni Baijixiang Xiehui*) dan Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia. Kalangan akademisi Keturunan Tionghoa ikut mengambil peran dengan mendirikan Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia (*Yinhua Xiezuozhe Xiehui*), dan Perhimpunan Kesusasteraan Tanah Air.

Tahun 1999, 10 koran Berbahasa Mandarin mendapatkan izin kembali penerbitan setelah dihapuskannya Kementerian Penerangan yang dibentuk sebelumnya oleh Pemerintah Orde Baru. Sekolah-sekolah Tionghoa juga dapat mengajarkan kembali Bahasa Mandarin. Masa Kepemimpinan Abdurahman Wahid merupakan masa yang paling bersejarah dalam sejarah Keturunan Tionghoa "Peranakan" di Indonesia. Melalui kebiakannya Gus Dur (panggilan akrabnya) menjadikan Kepercayaan Konfusianisme menjadi suatu agama resmi di Indonesia dan memperbolehkan tradisi Imlek dan *Cap Go Meh* untuk dirayakan secara umum. Sehingga Masyarakat Keturunan Tionghoa sangat menghormati sosok Gus Dur bahkan tidak sedikit klenyeng-klenyeng yang menjadikan Gus Dur sebagai bentuk penghormatan dalam ritual kegamaan Konghucu (Dawa, 2006, hlm. 139).

Pada tahun yang sama didirikannya PGTI (Persekutuan Gereja Indonesia) PGTI lahir sebagai hasil rapat gabungan "CCCOWE" Jakarta yang terdiri dari beberapa organisasi gereja diantaranya Gerakan Penginjilan Era 2000, Pusat Pelayanan Musik Gerejawi, Pusat Pelayanan Literatur Injil, dan Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Injil Jakarta yang diresmikan tanggal 29 Agustus 1998. Keempat organisasi tersebut mendukung sepenuhnya baik secara moriil dan moral dalam pendirian PGTI. Seluruh aturan PGTI menggunakan Bahasa Mandarin dan Hokkian terutama dalam hal kegiatan kebaktian.

KESIMPULAN

Masyarakat Keturunan Tionghoa dalam sejarah perkembangannya terus mengalami masa kedinamisan serta tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara. Perlu adanya peran Pemerintah dalam memperhatikan nasib Para Keturunan Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam suatu tinjauan historis para Keturunan Timur Asing termasuk Keturunan Tionghoa dan Arab sebagai kelompok masyarakat minoritas memperjuangkan dan mendukung penuh pembentukan *nation buildings* sebagai upaya pengintegrasian diri Bangsa Indonesia. Masyarakat Tionghoa memiliki peran dalam hal aspek perekonomian, karena perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan Masyarakat Tionghoa Masa Orde seakan 'diacuhkan' akan tetapi disisi lain sebagian elit orang-orang Tionghoa dijadikan oleh pemerintah sebagai phak yang mendukung barometer dalam menjalankan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Soeharto saat itu memanggil semua pakar ekonomi termasuk dari kalangan Tionghoa untuk dijadikan sebagai menteri salah satunya adalah Soemitro Djodjohadikusomo.

Dimasa reformasi menjadi awal kebebasan Masyarakat Keturunan Tionghoa sebagai masyarakat yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan sebagai warganegara dengan memperbolehkan kembali tradisi berunsurkan Kebudayaan Tionghoa yang sebelumnya dilarang kemudian diperbolehkan kembali untuk dijadikan sebagai kepentingan sosial maupun kepentingan penelitian dalam mengkaji Sejarah Keturunan Tionghoa Peranakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darini, R. 2008. Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia 1900-1945. Jurnal Mozaik Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 4 Nomor, 1-12
- Dawa, M. D. L. 2006. Menjadi Jemaat Multikultural : Suatu Visi untuk Gereja-Gereja Tionghoa Injili Indonesia yang Hidup di Tengah Konflik Etnis dan Diskriminasi Rasial. Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan, 7(1), 127–144. <https://doi.org/10.36421/veritas.v7i1.157>
- Dominggus, M. 2001. Rekonsiliasi Etnis: Misi Bersama Komunitas Kristen Tionghoa Jurnal Veritas. Volume 2 Nomor 2, 271-280
- Erb, Maribeth dkk. 2013. Regionalism in Post-Suharto Indonesia. London: Roudledge Curzon
- Handoyo, E. 2015. Studi masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Ombak
- Hanggara, A. 2018. Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 14 (02). <https://doi.org/10.25134/equi.v14i02.1129>

- Hutagalung. 2016. Rasia Bandoeng: Suatu Percintaan yang melanggar Bangsa Tionghoa di Bandung Tahun 1917. Bandung: Ultimus
- Irene Susanto. 2017. Penggambaran Budaya Etnis Tionghoa dalam Film “ Ngenest .” Jurnal E-Komunikasi, 5(1), 1–13.
- Ismaun, dkk. 2010. Metodologi sejarah. Bandung: Asosiasi Pendidikan Sejarah.
- Jan Sihar, A. & Steenbrink. (2008) A History of Christianity in Indonesia. Leiden: Brill
- Japalatu, K. 2019. 150 Tahun Perkabaran Injil Patekoan: Dari Gereja Tionghoa ke Gereja Kristen Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Kahin. 2013. Nasionalisme & Revolusi Indonesia. Jakarta: Komunita Bambu
- Koentjaraningrat. (1989). Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Krippendorff, Klaus. 1991. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Rajawali Press, Terjemahan.
- Mozingo, D. 2007. Chinese Policy Toward Indonesia, 1949-1967. New York: Cornell University
- Nurhajarini, D. R., Purwaningsih, E., & Fibiona, I. 2015. Akulturasi Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang). <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/1131>
- Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Supardan, D. 2015. Manusia, Kekerasan, Multikultural, dan Transformasi Pendidikan. Bandung: Rizqi Press.
- Suryadi, Y. 2015. JALAN BAKTI DALAM. 336–352.
- Utomo. 2010. Peran etnis cina dalam perdagangan di surakarta pada tahun 1959-1998. UPT Universitas Negeri Sebalas Maret.